

DAMPAK BUDAYA PATRIARKI TERHADAP KEHIDUPAN DAN KEAMANAN PEREMPUAN SDG 5: GENDER EQUALITY (KESETARAAN GENDER)

Syafania Calista Arifin¹, Jenniver Immanuel Muswanto², Indah Prabawati³, Irre An Suprpto⁴

^{1,2,3,4}Universitas Negeri Surabaya

Email : 25040674304@mhs.unesa.ac.id¹, 25040674295@mhs.unesa.ac.id², indahprabawati@unesa.ac.id³, firresuprpto@unesa.ac.id⁴

Abstrak

Sampai saat ini budaya patriarki masih terjadi di Indonesia, dapat dilihat dari beberapa ruang lingkup seperti ekonomi, pendidikan, politik, hingga lingkup hukum. Banyak kejadian yang korbannya merupakan seorang perempuan dan pelakunya laki laki. Kedudukan laki yang lebih dominan sering disalahgunakan sehingga posisi sebagai perempuan tidak aman berada dimanapun. Indonesia merupakan negara hukum namun belum bisa memayungi keadilan perempuan alasannya karena ranah perempuan masih dianggap terlalu domestik. Sehingga penegakan hukum pun masih cukup lemah dan tidak adil gender.

Kata Kunci: Perempuan, Hukum, Kedudukan.

Abstract

To this day, patriarchal culture persists in Indonesia, as evidenced in various spheres such as the economy, education, politics, and the legal system. Many incidents involve women as victims and men as perpetrators. Men's dominant position is often abused, leaving women feeling unsafe wherever they are. Indonesia is a nation governed by the rule of law, yet it has not been able to ensure justice for women because the female sphere is still viewed as too domestic. Consequently, law enforcement remains weak and gender-biased.

Keywords: Women, Law, Statust.

PENDAHULUAN

Kontribusi dan kemajuan dalam suatu kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sejak dahulu sampai era modern sekarang ini hanya ada dua pemeran utamanya yaitu laki-laki dan perempuan. Kedua jenis kelamin inilah yang memiliki kontribusi dalam mewujudkan masyarakat maju dan

masyarakat yang sejahtera. Tentu saja peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari sejak dahulu hingga era modern saat ini masih menjadi perdebatan publik yakni setara atau tidak setara dengan laki-laki, artinya peran laki-laki dan perempuan masih sering menjadi bahan diskusi dalam meninjau

peran perempuan dalam kehidupan Masyarakat.

Namun kondisi perempuan saat ini juga telah memiliki kesempatan sama untuk berkontribusi dalam masyarakat, dalam pembangunan dan untuk membuka lapangan pekerjaan dan menjadi tenaga untuk menambah pendapatan keluarga. Secara faktual peran perempuan dalam masyarakat masih nampak pada dua peran utama yaitu peran secara internal atau domestik dalam rumah tangga dan peran secara eksternal atau peran pada sektor publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan masih memiliki dua peran yang harus dilaksanakan setiap hari sebagai sebuah rutinitas demi kemajuan kehidupan rumah tangga.

Peran ganda perempuan ditunjukkan pada peran domestik, yakni menyangkut tugas-tugasnya sebagai seorang isteri dan ibu dalam rumah tangga, dan peran pada sektor publik, yakni menyangkut karir profesional dalam masyarakat atau di luar rumah. Kedudukan perempuan dalam keluarga, masyarakat dan peranannya dalam pembangunan perlu dipelihara dan terus ditingkatkan, sehingga dapat memberikan sumbangan yang sebesar-besarnya bagi pembangunan bangsa dengan

memperhatikan kodrat, harkat dan martabatnya. Kesempatan perempuan untuk maju dan menempatkan diri setara dengan pria tidak mudah karena adanya berbagai hambatan seperti hambatan biologis, kodrat untuk mengandung, melahirkan, dan membesarkan anak, sosial budaya memandang perempuan makhluk pasif, lemah, bergantung psikis, ekonomis pada laki-laki dan hambatan teologis (Djarkasi, 2010).

Selain itu, kurangnya representasi perempuan dalam posisi strategis juga membuat kebijakan yang dihasilkan belum sepenuhnya sensitif terhadap kebutuhan dan perlindungan perempuan. Akibatnya, upaya menciptakan lingkungan yang aman dan setara masih menghadapi banyak tantangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk mengkaji lebih dalam dampak budaya patriarki terhadap kehidupan dan keamanan perempuan. Dengan memahami akar masalahnya, diharapkan muncul kesadaran bersama untuk membangun masyarakat yang lebih adil, setara, dan aman bagi semua, tanpa memandang jenis kelamin.

Tujuan Identifikasi Masalah Kebijakan

Marginalisasi gender, terutama yang dialami oleh perempuan, merupakan isu utama yang diangkat dalam Tujuan ke-5 SDGs. Hal ini tercermin dari budaya patriarki yang kental di negara kita menjadi salah satu penyebab terjadinya marginalisasi terhadap kaum perempuan dalam masyarakat. Marginalisasi perempuan merupakan marginalisasi yang dialami oleh perempuan. Bhasin mengemukakan, di dalam masyarakat patriarki, laki-laki sering kali memiliki kekuasaan atas lima aspek kehidupan perempuan.

Pertama, dalam tenaga kerja, perempuan dibatasi pada peran domestik seperti melayani keluarga, sementara laki-laki didorong untuk berkarir di ranah publik. Kedua, dalam reproduksi, perempuan sering dihalangi mengakses alat kontrasepsi dan dipaksa mengikuti peran keibuan yang ditentukan. Ketiga, seksualitas perempuan dikontrol dengan menempatkan mereka sebagai objek seksual untuk kepuasan laki-laki.

Keempat, pergerakan perempuan dibatasi untuk mengatur seksualitas, produksi, dan reproduksi, melalui aturan yang membatasi mobilitas, ruang, dan interaksi. Kelima, dalam ekonomi, laki-laki mendominasi kepemilikan properti dan

sumber daya, membuat perempuan terpinggirkan secara ekonomi dan lemah dalam pengambilan keputusan.

Secara tegas tujuan ke-5 SDG's adalah untuk mencapai kesetaraan gender, menghapuskan diskriminasi, kekerasan berbasis gender, dan kesenjangan akses terhadap sumber daya, yaitu pada bidang pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi kepada perempuan. Untuk itu, Indonesia telah memberlakukan kebijakan tentang tujuan ke-5 SDGs ini dengan adanya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (perlindungan pekerja perempuan), yang bertujuan untuk melindungi hak pekerja perempuan, memastikan lingkungan kerja aman, dan memberikan perlindungan khusus seperti cuti hamil. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang bertujuan untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban, dan menghukum pelaku. Dan Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, yang bertujuan untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui kebijakan, layanan, dan edukasi.

Kebijakan pemerintah dalam upaya mengatasi persoalan yang berkaitan

tentang persoalan Perempuan, Masyarakat dan Budaya Patriarki, Kebijakan Pemerintah melalui Instruksi Presiden/ Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Kebijakan ini juga dibuat dalam upaya pencegahan dan penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan. Kebijakan Pemerintah melalui Instruksi Presiden/ Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional.

Kesetaraan gender dalam kebijakan pembangunan menjadi indikator yang sangat penting dan cukup signifikan, karena kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk maju dan berkembang, dalam upaya mengurangi kemiskinan dan melaksanakan pemerintahan atau memerintah secara efektif dan efisien. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat dilihat dari semakin tinggi apresiasi terhadap dimensi gender maka akan semakin besar upaya suatu negara untuk menekan angka kemiskinan, dan sebaliknya jika rendah apresiasi terhadap dimensi gender dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan akan berdampak pada peningkatan angka kemiskinan serta mengalami hambatan dalam melaksanakan

pemerintahan atau memerintah secara efektif dan efisien.

TINJAUAN PUSTAKA (Teori)

Konsep budaya patriarki merupakan salah satu teori utama dalam kajian gender yang menjelaskan adanya sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang memiliki kekuasaan dominan dalam berbagai aspek kehidupan. Istilah patriarki berasal dari kata patriarch yang berarti kekuasaan ayah atau laki-laki dalam keluarga maupun masyarakat. Dalam sistem ini, laki-laki sering diposisikan sebagai pemimpin, pengambil keputusan utama, dan pemegang kontrol terhadap sumber daya sosial, ekonomi, maupun politik.

Menurut Sylvia Walby, patriarki merupakan sistem struktur sosial yang menempatkan laki-laki dalam posisi dominan sehingga perempuan mengalami subordinasi atau ketidaksetaraan dalam berbagai bidang kehidupan. Walby menjelaskan bahwa patriarki dapat terlihat melalui beberapa struktur, seperti dalam keluarga, pekerjaan, negara, kekerasan terhadap perempuan, serta dalam budaya dan seksualitas. Budaya patriarki juga membentuk norma dan nilai yang mempengaruhi cara masyarakat memandang peran laki-laki dan

perempuan. Dalam banyak masyarakat tradisional, perempuan sering dianggap memiliki peran utama di ranah domestik seperti mengurus rumah tangga dan anak, sedangkan laki-laki dianggap lebih pantas berperan di ranah publik seperti pekerjaan, politik, dan kepemimpinan. Pola tersebut secara tidak langsung memperkuat ketimpangan gender dan membatasi ruang gerak perempuan.

Selain itu, patriarki juga dapat mempengaruhi struktur kekuasaan dalam masyarakat sehingga perempuan seringkali memiliki akses yang lebih terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Hal ini menyebabkan ketidakadilan gender yang berdampak pada kualitas hidup perempuan.

Rokhmansyah (2013); menyatakan bahwa patriarki berasal dari kata patriarkat; berarti struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral dan segala-galanya. Sistem patriarki yang mendominasi kebudayaan masyarakat menyebabkan adanya kesenjangan dan ketidakadilan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menerapkan jenis kualitatif melalui studi pustaka dan studi dokumen. Studi dokumen merupakan

jenis penelitian yang didasarkan pada dokumen tertulis untuk dianalisis dan diinterpretasikan. Dokumen tersebut bisa berupa buku teks, surat kabar, majalah, surat-surat, film, catatan harian, naskah, artikel, dan sejenisnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Budaya patriarki masih berpengaruh kuat dalam kehidupan masyarakat, menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan dan perempuan dalam posisi subordinat. Dampaknya terlihat dalam akses terbatas perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan. Perempuan sering terjebak dalam peran domestik dan mengalami ketimpangan gender di sektor publik serta marginalisasi ekonomi.

Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan mencerminkan perlindungan yang belum optimal, meski ada kebijakan pemerintah seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Rendahnya representasi perempuan dalam posisi strategis juga berdampak pada kebijakan yang kurang responsif terhadap kebutuhan mereka. Ketimpangan gender merugikan kemajuan negara, sehingga perhatian terhadap aspek gender dalam pembangunan sangat penting untuk menciptakan perkembangan

yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya komprehensif melalui kebijakan, edukasi, dan perubahan budaya diperlukan untuk mencapai kesetaraan gender dan perlindungan lebih baik bagi perempuan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Budaya patriarki memiliki struktur sosial laki laki menjadi kepala keluarga yang bertugas mencari nafkah dan perempuan hanya cukup dirumah saja. Perbedaan biologis ini lebih merugikan pihak perempuan sehingga memiliki beban ganda seperti mengurus anak dan mengurus rumah. Kesenjangan gender ini sering disalahgunakan untuk melakukan kekerasan hingga eksploitasi seksual, meskipun tidak mudah mengubah pola pikir masyarakat tetap harus diupayakan dengan mengubah kebijakan negara tidak bias gender dan cara cara yang tersistematis dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Sakina, A. I., & A., D. H. S. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia. *Social Work Journal*.
- Hartiana, T. I. P. (2014). Penggunaan E-Magazine sebagai Bentuk Public Relations 2.0. *Jurnal Kajian Komunikasi*.

Trianggoro, C., Tupan, T., Djaenudin, M., Widuri, N. R., & Rahayu, R. N. (2021).

Pengembangan repositori data pada lembaga riset dengan status Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*.